



BONGKAR MUAT KONTAINER: Sebuah kapal kargo dengan dipandu kapal tunda bersiap berlabuh untuk melakukan aktivitas bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA

Menjaga Neraca Perdagangan Tetap Surplus

Pemerintah perlu mendorong upaya hilirisasi industri untuk menjaga kinerja neraca perdagangan nasional di tengah ancaman perlambatan ekonomi global pada tahun depan.

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

NERACA perdagangan Indonesia terus mengalami surplus hingga Oktober 2022. Capaian surplus itu terhitung telah berjalan selama 30 bulan berturut-turut dari Mei 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara kumulatif atau dari Januari sampai Oktober 2022 neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US\$45,52 miliar atau tumbuh 47,52% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021.

"Bahkan, neraca perdagangan pada Januari-Oktober 2022 ini sudah lebih besar dari total surplus neraca perdagangan pada 2021," ungkap Deputy Bidang Statistik dan Jasa BPS, Setianto, Selasa (15/11).

Lebih lanjut, pencapaian tersebut terdiri atas nilai ekspor secara kumulatif yang mencapai US\$244,14 miliar atau meningkat 30,97% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, nilai impor secara kumulatif tercatat mencapai US\$198,62 miliar. Angka itu juga tercatat meningkat 27,72% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021. "Capaian ini yang menyebabkan surplus neraca perdagangan barang utamanya ditopang oleh neraca komoditas nonmigas," kata Setianto.

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan pada Januari-Oktober 2022 naik 20,40% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021. Demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 14,17% serta ekspor hasil tambang dan lainnya naik 82,68%.

Sementara itu, nilai impor pada Januari-Oktober 2022 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada barang konsumsi sebesar US\$657,7 juta atau naik 4,19%, bahan baku/penolong US\$35.339,7 juta atau naik 30,10%, dan barang modal US\$7.114,7 juta atau naik 31,77%.

Di lain pihak, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono memandang bahwa surplus neraca perdagangan telah berkontribusi positif dalam

menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas kebijakan terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal serta mendukung pemulihan ekonomi nasional," ucap Erwin.

Lebih lanjut, surplus neraca perdagangan pada Oktober 2022 bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas dan perbaikan defisit neraca perdagangan migas.

Pada Oktober 2022, surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat US\$7,66 miliar, lebih tinggi jika dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya sebesar US\$7,08 miliar.

Perkembangan tersebut didukung oleh tetap kuatnya kinerja ekspor nonmigas yang tercatat sebesar US\$23,43 miliar di tengah penurunan impor nonmigas.

Tetap kuatnya kinerja ekspor nonmigas, terutama bersumber dari ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti CPO, bahan bakar mineral, termasuk batu bara, yang didukung penguatan kebijakan pemerintah dan harga komoditas global yang masih tinggi. Ekspor produk manufaktur, termasuk besi dan baja, juga tercatat meningkat.

Ditinjau dari negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, India, dan Amerika Serikat masih tetap kuat dan menjadi kontributor utama terhadap total ekspor Indonesia.

Impor nonmigas meskipun sedikit menurun sesuai dengan pola musimannya, tetapi tetap tinggi sejalan dengan terus berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik.

Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas tercatat sedikit menurun dari US\$2,12 miliar pada September 2022 menjadi US\$1,99 miliar pada Oktober 2022 seiring dengan kenaikan ekspor migas dan penurunan impor migas.

Penyempitan

Secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan meskipun neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus, ke depannya neraca perdagangan Indonesia



ANTARA /DEDHEZ ANGARA

akan mengalami penyempitan. "Pertumbuhan impor telah mengikuti pertumbuhan ekspor. Oleh karena itu, kami mempertahankan pandangan kami bahwa surplus perdagangan cenderung menyempit ke depan," ujar Faisal.

Menurutnya, impor diperkirakan akan terus sejalan dengan ekspor untuk beberapa bulan ke depan di tengah pemulihan ekonomi yang kuat dan menunjukkan peningkatan permintaan domestik.

Disisi lain, tren kenaikan sebagian besar harga komoditas terlihat tertahan di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi global yang bersumber dari lonjakan inflasi global dan mengarah pada normalisasi moneter global yang semakin agresif. Hal itu pada akhirnya dapat melemahkan permintaan global. "Hal ini berisiko memberikan pelemahan kinerja ekspor," tuturnya.

Secara terpisah, ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengatakan pemerintah perlu mendorong upaya hilirisasi industri untuk menjaga kinerja neraca perdagangan nasional di tengah ancaman perlambatan ekonomi global pada tahun depan.

Dia menjelaskan hilirisasi industri ialah meningkatkan nilai

akan mengalami penyempitan. "Pertumbuhan impor telah mengikuti pertumbuhan ekspor. Oleh karena itu, kami mempertahankan pandangan kami bahwa surplus perdagangan cenderung menyempit ke depan," ujar Faisal.

Menurutnya, impor diperkirakan akan terus sejalan dengan ekspor untuk beberapa bulan ke depan di tengah pemulihan ekonomi yang kuat dan menunjukkan peningkatan permintaan domestik.

Disisi lain, tren kenaikan sebagian besar harga komoditas terlihat tertahan di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi global yang bersumber dari lonjakan inflasi global dan mengarah pada normalisasi moneter global yang semakin agresif. Hal itu pada akhirnya dapat melemahkan permintaan global. "Hal ini berisiko memberikan pelemahan kinerja ekspor," tuturnya.

Secara terpisah, ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengatakan pemerintah perlu mendorong upaya hilirisasi industri untuk menjaga kinerja neraca perdagangan nasional di tengah ancaman perlambatan ekonomi global pada tahun depan.

Dia menjelaskan hilirisasi industri ialah meningkatkan nilai tambah produk hasil olahan di dalam negeri sebelum diekspor ke berbagai negara. Dengan itu, Indonesia tidak akan bergantung lagi dari ekspor komoditas (bahan mentah) yang nilai tambahnya kecil di pasar internasional. "Ekspor ekspor manufaktur dan barang-barang yang diproses harus ditingkatkan agar tidak terlalu tergantung pada komoditas," ujar Irman.

Dia mengatakan para pemangku kepentingan harus mendorong upaya hilirisasi industri tersebut sebagai transformasi struktural serta melanjutkan program yang sudah berjalan seperti hilirisasi industri nikel. "Misalnya, hilirisasi industri nikel dan bauksit," lanjutnya.

Irman menegaskan program hilirisasi industri dapat menjaga kinerja neraca perdagangan nasional ke depan yang berpotensi mengecil seiring dengan perlambatan ekonomi global pada 2023.

Namun, dia memastikan pertumbuhan ekspor nasional tetap akan positif pada tahun depan atau tidak menurun seperti periode krisis yang pernah terjadi sebelumnya. "Mengecilnya surplus tersebut diiringi perbaikan ekonomi domestik," pungkash Irman. (Des/E-3)

NILAI EKSPOR KOPI INDONESIA NAIK:

Warga melihat biji kopi *robusta* sebelum dipanen di Desa Cibeureum, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Kementerian Perdagangan menyatakan sepanjang Januari hingga Mei 2022, nilai ekspor kopi Indonesia mencapai 394 juta dolar AS atau meningkat 37% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.



Jalur Keuangan Presidensi G-20 Sisakan Hal yang Menggantung

HASIL KTT G-20: Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hasil KTT G-20 kepada wartawan di Media Center, BICC, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (16/11).

Dana percepatan transisi energi dan kerja sama internasional di bidang perpajakan jadi poin yang menguntungkan Indonesia.

M ILHAM RAMADHAN
ilham@mediaindonesia.com

PRESIDENSI G-20 Indonesia resmi berakhir dan menghasilkan *Bali Leader's Declaration* yang disebut menjadi capaian gemilang.

Dokumen berisikan 52 paragraf kesepakatan negara-negara anggota G-20 itu memuat komitmen bersama untuk membawa perekonomian global ke jalur pertumbuhan yang lebih baik.

Dokumen itu turut merangkum berbagai capaian yang diperoleh dari dua jalur (*track*) utama forum G-20, yakni *sherpa* dan keuangan. Jalur keuangan sempat mencatatkan komunikasi atau pernyataan bersama pada Februari 2022, sebelum perang Rusia-Ukraina pecah dan menambah ketidakpastian global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak tercapainya komunikasi di tingkat menteri itu disebabkan adanya tensi geopolitik yang memanas. "Pertemuan di tingkat menteri tidak mencapai kesepakatan setelah adanya perang itu dan hanya menghasilkan *chair summary*," ujarnya dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11).

"Itu menggambarkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah perang. Perbedaannya sangat lebar dari seluruh pertemuan yang selama satu tahun ini dilakukan sebanyak delapan kali," tambahnya.

Meski sukar mencapai kesepakatan dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20, setidaknya terdapat keluaran (*deliverable*) yang nyata dan dapat mendukung pemulihan dunia.

Pertama, jalur keuangan Presidensi G-20 Indonesia berhasil melahirkan *Pandemic Fund*. Itu ialah lembaga yang dibentuk untuk mengelola dan memobilisasi dana urunan dalam rangka kesiapsiagaan pandemi di masa mendatang.

Setidaknya, hingga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 berakhir, *Pandemic Fund* telah berhasil mengumpulkan dana sebesar US\$1,5 miliar. Dana tersebut berasal dari 24 donor yang terdiri dari 21 negara anggota G-20 dan non-G-20 dan 3 lembaga filantropi.

Kehadiran *Pandemic Fund* diharapkan bisa mendukung kebutuhan negara-negara miskin dan berkembang, untuk menghadapi kemungkinan pandemi di kemudian hari. Seluruh negara dapat mengajukan proposal dan menerima dana dukungan tersebut melalui skema hibah.

Selain itu, jalur keuangan Presidensi G-20 berhasil membentuk *energy transition mechanism (ETM) country platform*. Itu dibentuk untuk mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan pengembangan energi terbarukan yang lebih berkelanjutan.

Indonesia telah melakukan kajian untuk memensiunkan 15 giga-

watt pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Itu menjadi langkah awal transisi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

Berikutnya, jalur keuangan dalam Presidensi G-20 Indonesia juga berkontribusi pada upaya transformasi digital. Itu dilakukan melalui dukungan sistem pembayaran pascapandemi dengan merencanakan penerbitan *central bank digital currencies (CBDC)* dan *regional payment connectivity* di negara ASEAN.

Hal itu juga diikuti dengan upaya peningkatan inklusi keuangan bagi kelompok rentan yang dilakukan melalui *Yogyakarta Financial Inclusion Framework* untuk mendorong produktivitas UMKM, perempuan, dan anak muda.

Capaian berikutnya ialah kontribusi jalur keuangan pada upaya ketahanan pangan. Itu dilakukan dengan mendorong kolaborasi global dalam mengatasi isu kerawanan pangan yang sedang terjadi saat ini. Jalur keuangan Presidensi G-20 juga menghasilkan capaian lain berupa dukungan untuk membantu ketersediaan pembiayaan terhadap negara miskin dan rentan melalui pembentukan *Resilience and Sustainability Trust (RST)* oleh IMF yang sejauh ini telah mencapai US\$81,6 miliar.

Lalu kesepakatan untuk mengatasi krisis utang negara miskin dan berkembang dengan program restrukturisasi utang. Kemudian mendorong peningkatan kapasitas pendanaan bank pembangunan multilateral.

Selain itu, disepakati langkah mengembangkan pembangunan infrastruktur melalui perumusan

indikator investasi yang berkualitas. Lalu mendorong kerja sama perpajakan internasional dan memperkuat ketahanan keuangan global dan jaring pengaman sistem keuangan global.

Belum sepenuhnya konkret

Namun, sejumlah keluaran tersebut dinilai belum sepenuhnya mencakup inti persoalan sektor perekonomian dan keuangan global saat ini. Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai ada dua topik utama yang dianggap gagal mencapai solusi konkret.

Pertama ialah terkait dengan *exit strategy* dari situasi global saat ini. Padahal, di awal-awal mengampu Presidensi G-20, Indonesia kerap menggaungkan untuk mencari jalan keluar bersama dari ketidakpastian dunia. Namun, hingga gelaran itu berakhir, poin tersebut justru samar-samar terlihat.

"Menkeu tidak lagi pernah berbicara mengenai *exit strategy* itu, karena sudah mulai berjalan sendiri. Itu terlihatnya kurang pada hasil atau *outcome* di jalur keuangan. Padahal, ini masalah yang utama," kata Yose saat dihubungi, Sabtu (19/11).

"Jadi, ini tidak sama dengan 2008, dengan negara G-20 mencapai kesepakatan untuk kebijakan makroekonomi yang diambil ketika menghadapi krisis keuangan global. Jadi, itu mungkin malah yang paling pentingnya agak kurang tegas, kurang eksplisit," tambahnya.

Redupnya semangat untuk mencari jalan keluar bersama juga tecermin pada agresifnya sejumlah bank sentral, utamanya The Federal Reserve, dalam mengetatkan

likuiditas. Itu justru mengakibatkan ketidakpastian baru yang bakal diikuti dengan pelemahan mata uang negara-negara dunia.

Alih-alih pulih bersama, justru akan banyak negara yang memasuki jurang resesi akibat kompleksitas perekonomian global. "Kalau jalan sendiri-sendiri, hasilnya adalah masing-masing itu akan membuat negara lain terkena dampak negatifnya," tutur Yose.

Poin penting kedua yang dinilai kurang cukup berhasil dari jalur keuangan G-20 kali ini ialah utang negara-negara miskin dan rentan, alias belum berkembang. Setidaknya, kata Yose, ada lebih dari 60 negara memiliki risiko tinggi terhadap kondisi utang.

Itu utamanya disebabkan pandemi covid-19 dan diperburuk situasi global saat ini. "Permasalahan utang negara-negara belum berkembang ini masih mengganggu sekali. Mungkin risiko pada perekonomian dunia kecil karena mereka ini kebanyakan negara kecil," jelas Yose.

Saat dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan persoalan utang negara-negara berkembang perlu menjadi perhatian bagi Indonesia. Selain ditujukan membantu negara yang kesulitan, itu dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa meringankan beban utang finansial.

"Indonesia harus bisa terlibat aktif dalam pembahasan *debt framework*, terkait utang. Jadi, tidak hanya memperjuangkan negara miskin, Indonesia juga bisa mendapatkan hasil dari penanguhan utang atau *debt cancellation*, pengurangan bunga pokok utang," kata dia.

Bhima berpendapat, poin paling krusial di sektor keuangan yang dapat dicapai dalam forum G-20 ialah mengenai dorongan untuk mempercepat transisi energi. Dalam hal itu, Indonesia meluncurkan *just energy transition partnership (JETP)* untuk mendukung agenda transisi energi nasional. Amerika Serikat dan Jepang disebut menjadi donor pertama dengan nilai US\$20 miliar hingga 2027.

"Dana JETP itu, Afrika Selatan mendapatkan dana US\$8,5 miliar; Indonesia mendapatkan US\$20 miliar, jauh lebih besar karena memang diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu yang memimpin percepatan transisi energi di baik kawasan maupun global," terangnya.

Hal yang tak kalah penting dari jalur keuangan Presidensi G-20 Indonesia ialah kerja sama internasional di bidang perpajakan. Bhima berharap agar kerja sama tersebut dapat terlaksana dengan baik dan bisa mengungkit rasio perpajakan nasional hingga ke atas 11%.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amir Uskara mengatakan peran negara-negara Asia akan menjadi sentral dalam kerja sama perpajakan internasional. Karena itu, hal itu diharapkan mampu mendukung program keterbukaan informasi perpajakan yang ada di dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Perlu adanya tindak lanjut dari sisi pemerintah untuk mendorong realisasi dari program di jalur keuangan. Tindak lanjut bisa dalam bentuk regulasi teknis hingga kerja sama di tingkat bilateral," kata Amir kepada *Media Indonesia*. (Mir/E-1)



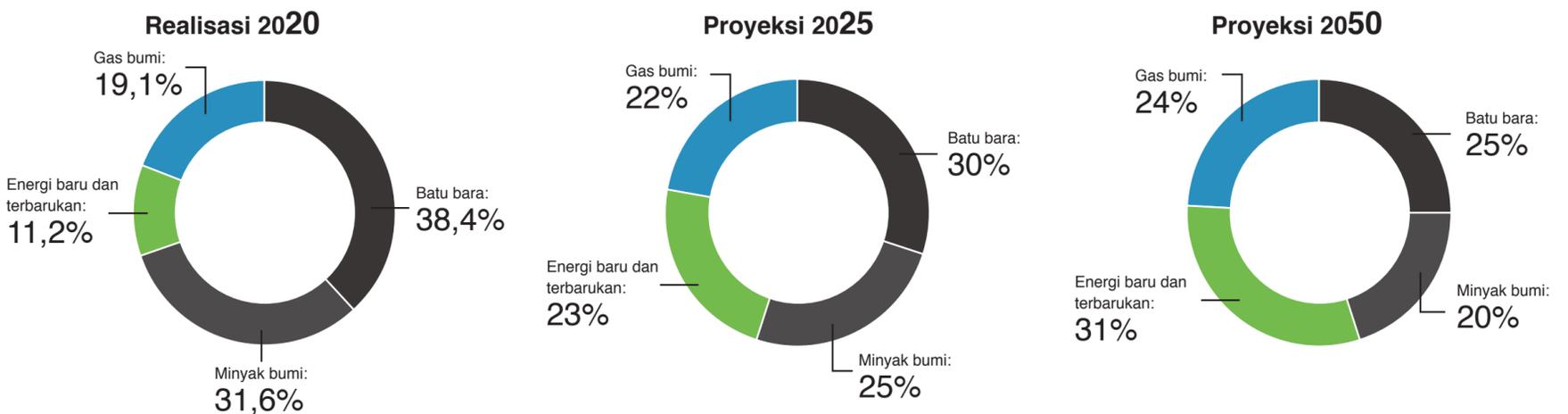
Reformasi Tata Kelola Energi Nasional bagi Indonesia di Masa Depan

PERMINTAAN energi terus meningkat seiring dengan kemajuan peradaban, teknologi, gaya hidup, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun berkewajiban menyediakan energi dalam jumlah yang cukup, merata, terjangkau, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai energi yang berkeadilan.

Terkait dengan itu, pemanfaatan energi di Indonesia saat ini masih mengandalkan energi fosil, baik yang disubsidi maupun yang berasal dari impor. Di sisi lain, potensi energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air sangat melimpah. Energi baru terbarukan harus mampu menggantikan energi karbon yang mempunyai emisi tinggi, seperti bahan bakar fosil, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Karena itu, reformasi dalam tata kelola energi nasional yang baik sangat penting lantaran dapat membawa dampak besar bagi Indonesia di masa mendatang. Tujuannya ialah menjamin ketersediaan energi yang cukup dan berkualitas baik, memiliki harga terjangkau, serta ramah lingkungan. (*Rkp)

Indonesia Energy Mix 2020-2050



Jumlah KPM Subsidi

Dalam data PLN penerima tarif subsidi sebanyak 37 juta.

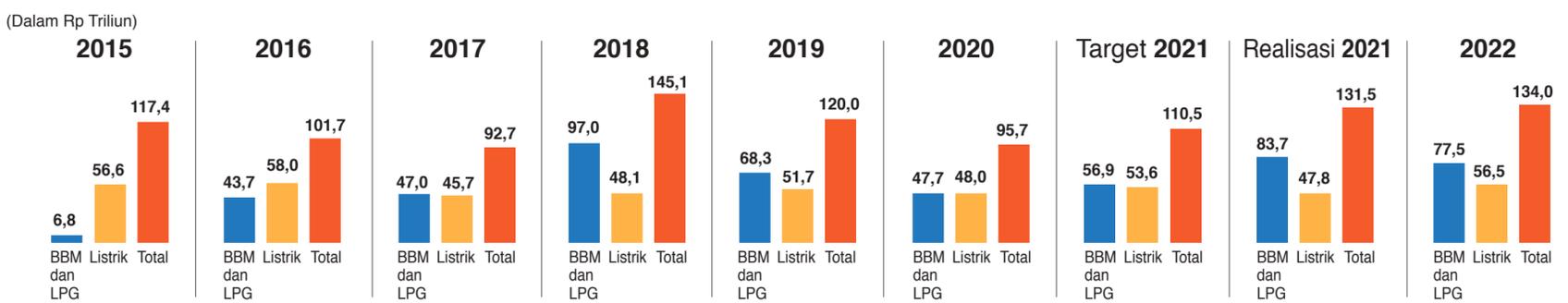
Dalam DTKS sebanyak 13.9 juta.

Jumlah masyarakat miskin sebanyak 26,1 juta per Maret 2022.

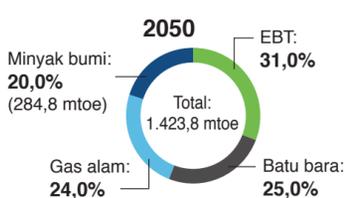
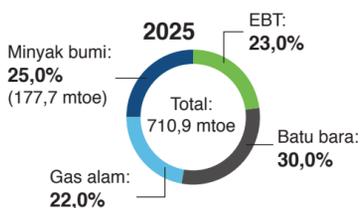
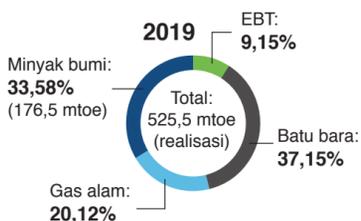
Menurut KPM BLT BBM penerima sebanyak 20,6 juta.

Keterangan:
• DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial)
• KPM (keluarga penerima manfaat)
• BLT (bantuan langsung tunai)
• BBM (bahan bakar minyak)

Subsidi belum Tepat Sasaran (Subsidi Energi 2015-2022)

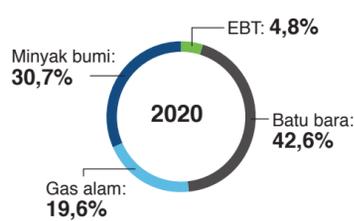


Rencana Umum Energi Nasional



Keterangan:
MTOE million tonnes of oil equivalent

Tinjauan Statistik Versi Energi Dunia



Fasilitas Pengusaha Batu Bara dalam Omnibus Law dan UU Minerba

- Perpanjangan konsesi hingga cadangan terkuras habis.
- Amdal lebih ringan.
- Royalti nol persen jika diolah menjadi DME.
- Limbah batu bara dikeluarkan dari kategori limbah B3.

Subsidi & Kompensasi Energi 2022

- Jumlah subsidi energi sebesar Rp502 triliun
- Penggunaan subsidi energi:
 - Ruas tol baru sepanjang 3.501 km dengan biaya Rp142,8 miliar per km.
 - Pembangunan SD sebanyak 227.886 unit dengan biaya Rp2,19 miliar per SD.
 - Pembangunan rumah sakit skala menengah sebanyak 3.333 unit dengan biaya Rp 150 miliar per RS.
 - Pembangunan puskesmas sebanyak 41.666 unit dengan biaya Rp 12 miliar per puskesmas.

Kebijakan yang Perlu Ditempuh

- Transisi energi: Pengarusutamaan gas
- Reformasi tata kelola migas
- Reformasi kebijakan batu bara migas
- Menimbang Pengembangan PLTN
- Pricing policy & reformasi sistem subsidi

Proyek Sektor Energi Berpotensi Tumpang-tindih

- Kilang Minyak Bontang
- Kilang Minyak Tuban
- Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan
- Upgrading 4 Kilang Eksisting (RDMP); Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Riau dan Sumatra Selatan
- Konstruksi tangki penyimpanan BBM
- Konstruksi tangki penyimpanan LPG

Peninjauan kembali Pembangunan Kilang

- Tidak perlu meneruskan rencana revitalisasi empat RDMP (refinery development master plan).
- Alihkan setengah untuk EBT dan green energy.
- Pemerintah hendak merealisasikan program B-30, B-40 dan B-100.
- Pemerintah berambisi mengembangkan industri mobil listrik secara besar.
- Industri mobil listrik ditopang ambisi sebagai produsen baterai terbesar di dunia.
- Dapat terjadi kekacauan apabila mewujudkan semua.
- Dapat menimbulkan ongkos ekonomi yang mahal.

Strategi Energi Nasional Pemerintah

- Meningkatkan *lifting* minyak.
- Mendorong pengembangan kendaraan listrik.
- Pengembangan dan pembangunan kilang minyak.
- Pengembangan EBT untuk mengurangi impor minyak.

Tujuan Strategi Energi Nasional

- Menjamin ketersediaan energi yang cukup.
- Energi memiliki kualitas yang baik.
- Memiliki harga yang terjangkau.
- Ramah terhadap lingkungan dalam kurun waktu 2020-2040.

